



CASCADING

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**



TUJUAN (POKIN LEVEL 1)	1. Terwujudnya Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Berkualitas								2. Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Berkeadilan Digital	
INDIKATOR TUJUAN (POKIN LEVEL 1)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi, responsivitas, dan kepercayaan pada komunikasi publik Pemerintah Daerah								Indeks Pemerintah Digital	
SASARAN (POKIN LEVEL 2)	1.1.Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik								2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	
INDIKATOR SASARAN (POKIN LEVEL 2)	Persentase agenda program komunikasi tematik dan prioritas daerah yang di publikasikan					Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Memperoleh Tindak Lanjut	Persentase layanan digital pemerintah daerah		
PROGRAM (SIPD)	1.1.1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik									
SASARAN PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	Meningkatnya kualitas komunikasi publik Pemerintah Daerah yang informatif, responsif, dan mudah diakses masyarakat								Meningkatnya kapabilitas pelayanan publik	
INDIKATOR PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	Persentase Informasi tematik dan prioritas daerah yang Dikelola sesuai Rencana Komunikasi Publik					Persentase Pemenuhan Pelayanan dan Informasi Publik sesuai Ketentuan	Persentase Pengaduan dan Aspirasi Publik yang Dikelola sesuai Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	Persentase Komponen Pendukung layanan digital pada layanan digital yang terpaduan di tahun yang bersangkutan		
KEGIATAN (SIPD)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								Pengelolaan E-government di Kabupaten/Kota	
SASARAN KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								Meningkatnya Dukungan terhadap pelayanan publik	
INDIKATOR KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	Jumlah Program Komunikasi Publik Prioritas yang Dipublikasikan berdasarkan Strategi Komunikasi yang Disusun					Jumlah PPID Pelaksana yang Difasilitasi Pemenuhan Informasi Publik	Persentase Pengaduan dan Aspirasi Publik yang Dikelola sesuai Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	Jumlah layanan digital yang Difermentasi sesuai dengan Pedoman		
SUB KEGIATAN (SIPD)	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Relasi Media	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Penyusunan Konten	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Koordinasi Pengelolaan Aplikasi, Data/Informasi, dan Layanan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang Terintegrasi
SASARAN SUB KEGIATAN (SIPD)	Terlaksananya Penyusunan strategi komunikasi publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Relasi Media	Terlaksananya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Penyusunan Konten	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya keterpaduan aplikasi, data/informasi, dan layanan digital Pemerintah Daerah
INDIKATOR SUB KEGIATAN (SIPD)	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Jumlah Konten Informasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terverifikasi, ditindaklanjuti dan diselesaikan	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional

igital yang Berkualitas																							
ta kelola dan penyelenggaraan Pemerintah Digital						2.2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Statistik Sektoral																	
erintah yang terpadu		Persentase Layanan Digital Pemerintah yang Terkelola		Persentase Layanan Infrastruktur Pemerintah Digital yang Andal		Persentase Data Statistik Sektoral yang Siap Dimanfaatkan																	
yelenggaraan layanan digital						Terwujudnya Infrastruktur Pemerintahan Digital yang andal, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan layanan digital pemerintah		2.2.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral															
ung Keterpaduan layanan g ditetapkan sebagai objek jalan						Persentase Komponen Tata Kelola dan Manajemen Layanan Digital yang Telah Diterapkan		Persentase kolaborasi Pemerintah Digital yang dilaksanakan		Tingkat Keandalan Layanan Infrastruktur Digital			Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Data Statistik Sektoral										
													Indeks Pembangunan Statistik (IPS)										
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																	
adap Penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah						Terwujudnya ketersediaan layanan infrastruktur digital pemerintah yang andal, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan layanan digital pemerintah		Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia															
asilitasi Pengembangannya		Jumlah Layanan Digital yang Difasilitasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital		Jumlah Instansi dan Pemangku Kepentingan yang Berpartisipasi dalam Kolaborasi Pemerintah Digital		Persentase Ketersediaan Layanan Infrastruktur Digital Pemerintah		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan fasilitasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan prinsip SDI		Persentase Produsen Data yang Difasilitasi Penyediaan Data Statistik Sektoral pada Kanal Data											
Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas		Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Audit TIK		Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE		Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Penyediaan Akses Internet		Koordinasi dan Kolaborasi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral dalam Sistem Statistik Nasional		Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kabupaten Cerdas		Meningkatnya penerapan tata kelola, manajemen Pemerintah Digital, dan audit TIK		Meningkatnya literasi dan kolaborasi Pemerintah Digital		Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur pusat data dan pusat kendali Pemerintah Daerah		Meningkatnya keterhubungan perangkat daerah melalui Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Meningkatnya ketersediaan akses internet Pemerintah Daerah		Meningkatnya koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan statistik sektoral		Meningkatnya penerapan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar		Meningkatnya keterpaduan kegiatan statistik sektoral dalam Sistem Statistik Nasional		Meningkatnya pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia		Meningkatnya kapasitas kelembagaan statistik sektoral		Meningkatnya Aksesibilitas Hasil Kegiatan Statistik Sektoral	
Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemen SPBE/Pemerintah Digital, serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo		Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah		Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah		Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	

2.3. Meningkatnya keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah											
Persentase layanan digital pemerintah yang Laik Keamanan											
2.3.1 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			2.3.2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota								
Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Keamanan Layanan Digital			Meningkatnya ketercapaian sasaran program OPD								
Persentase layanan digital yang Tindak Lanjut Keamanannya Selesai			Rerata Persentase Capaian Kinerja Program								
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten			Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Meningkatnya Pengujian Keamanan Layanan Digital			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Jumlah layanan digital yang Diuji Keamanannya			Persentase fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen/laporan perencanaan dan capaian kinerja SKPD			Persentase ketersediaan gaji dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan SKPD			Persentase fasilitasi ketersediaan operasional dan administrasi umum perangkat daerah		
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tribunalan/ Semesteran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Meningkatnya pemenuhan tata kelola keamanan informasi dan persandian Pemerintah Daerah	Meningkatnya pemenuhan sumber daya keamanan informasi dan persandian sesuai kebutuhan	Meningkatnya penerapan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan

			Pengadaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Umum	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Persentase ketersediaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase fasilitasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Persentase fasilitasi ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perijinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Mebel	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi